

POLITIK REPRESENTASI DALAM KEBIJAKAN BEASISWA DAERAH: ANALISIS WACANA PROGRAM BEASISWA CINTA BERGEMA KABUPATEN JEMBER

M. Gembong Abdillah¹, Iffan Gallant El Muhammady²

Email: taktikgemb@gmail.com¹, iffangallant@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi masalah pendidikan dalam kebijakan Program Beasiswa Cinta Bergema Kabupaten Jember menggunakan pendekatan What's the Problem Represented to be? (WPR) dari Carol Bacchi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya intervensi pemerintah daerah dalam sektor pendidikan melalui program beasiswa yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan, tetapi juga berpotensi menjadi arena produksi wacana politik dan legitimasi kekuasaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi kebijakan, dan analisis terhadap petunjuk teknis Beasiswa Cinta Bergema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember merepresentasikan masalah pendidikan terutama sebagai persoalan keterbatasan ekonomi masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi. Namun, representasi tersebut tidak sepenuhnya netral karena juga memuat dimensi simbolik dan identitas sosial-keagamaan tertentu melalui jalur afirmasi santri dan penghafal Al-Qur'an. Kebijakan ini memperlihatkan kecenderungan personalistik karena sangat dipengaruhi oleh preferensi dan citra politik kepala daerah. Dalam perspektif WPR, kebijakan tidak hanya menyelesaikan masalah pendidikan, tetapi juga memproduksi kategori sosial, menentukan kelompok yang dianggap prioritas, dan membentuk legitimasi politik pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Beasiswa Cinta Bergema belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan strategis pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Jember dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, diperlukan desain kebijakan beasiswa yang lebih inklusif, berbasis kebutuhan pembangunan daerah, serta tidak terlalu bergantung pada simbolisasi politik identitas.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Beasiswa Daerah, Carol Bacchi, WPR, Politik Pendidikan, Jember.

Abstract: This study aims to analyze the representation of educational problems in the Cinta Bergema Scholarship Program policy in Jember Regency using Carol Bacchi's What's the Problem Represented to be? (WPR) approach. The study is motivated by the increasing intervention of local governments in the education sector through scholarship programs that function not only as instruments for expanding educational access but also as arenas for political discourse production and power legitimization. This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, policy documentation, and analysis of the scholarship technical guidelines. The findings indicate that the Government of Jember Regency represents educational problems primarily as issues of economic limitations in accessing higher education. However, this representation is not entirely neutral as it also contains symbolic dimensions and socio-religious identity preferences through scholarship pathways for Islamic boarding school students and Qur'an memorizers. The policy demonstrates personalistic tendencies because it is strongly influenced by the political preferences and image-building of the regional leader. From the WPR perspective, the policy not only addresses educational problems but also produces social categories, determines priority groups, and constructs political legitimacy for the local government. This study concludes that the Cinta Bergema Scholarship Program has not been fully integrated with the strategic needs of long-term human resource development in Jember Regency. Therefore, a more inclusive scholarship policy design is needed, one that is aligned with regional development priorities and less dependent on political identity symbolism.

Keywords: Public Policy, Regional Scholarship, Carol Bacchi, WPR, Politics of Education, Jember.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sistem pendidikan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai layanan publik dasar, melainkan sebagai instrumen utama pembangunan manusia (human development) dan penguatan daya saing daerah. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat (Rachman, 2023; Rifa'i, 2019).

Pasca reformasi 1998 dan implementasi desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh ruang kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sektor pendidikan. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah lokal merumuskan kebijakan pendidikan sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing, termasuk melalui program bantuan pendidikan dan beasiswa daerah. Dalam perspektif kebijakan publik, beasiswa dipandang sebagai bentuk intervensi negara untuk memperluas akses pendidikan tinggi, mengurangi hambatan sosial-ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Namun demikian, kebijakan beasiswa tidak selalu hadir sebagai instrumen teknokratis yang netral (Sparrow, 2007). Dalam praktiknya, kebijakan dapat menjadi arena produksi makna, legitimasi kekuasaan, hingga instrumen pembentukan citra politik kepala daerah (Lawlor, 2016; Rochmansjah & Saputra, 2024).

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang aktif mengembangkan kebijakan pendidikan melalui Program Beasiswa Cinta Bergema. Program tersebut diluncurkan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia daerah. Beasiswa ini memiliki beberapa jalur penerimaan, seperti afirmasi ekonomi, prestasi akademik dan non-akademik, santri pondok pesantren dan penghafal Al-Qur'an, hingga kelompok profesi tertentu. Variasi kategori penerima tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mendefinisikan persoalan pendidikan sebagai masalah ekonomi semata, tetapi juga mengaitkannya dengan dimensi identitas sosial, kultur lokal, dan preferensi politik tertentu. Keragaman jalur penerima menunjukkan bahwa kebijakan beasiswa dapat bekerja sebagai instrumen distribusi akses sekaligus sebagai arena representasi kelompok sosial tertentu dalam kebijakan publik (Rachman, 2023; Kosasih et al., 2023).

Di sisi lain, keberadaan jalur afirmasi berbasis identitas keagamaan memunculkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana pemerintah daerah merepresentasikan masalah pendidikan melalui kebijakan tersebut. Dalam perspektif Carol Bacchi, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai respons atas masalah sosial yang sudah ada, tetapi sekaligus membentuk definisi mengenai apa yang dianggap sebagai "masalah" itu sendiri. Pendekatan *What's the Problem Represented to be?* (WPR) menempatkan kebijakan sebagai praktik diskursif yang memproduksi kategori sosial, menentukan prioritas distribusi sumber daya, serta membentuk legitimasi kekuasaan melalui bahasa dan narasi kebijakan (Bacchi, 2009; Bletsas & Beasley, 2012; Woo, 2023).

Melalui pendekatan tersebut, kebijakan beasiswa tidak hanya dapat dibaca sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan, tetapi juga sebagai mekanisme representasi politik dan produksi identitas sosial tertentu. Pemerintah melalui kebijakannya, memiliki kuasa untuk menentukan kelompok mana yang dianggap membutuhkan perhatian khusus, siapa yang diposisikan sebagai subjek prioritas, dan bentuk masalah pendidikan apa yang dianggap paling mendesak untuk diselesaikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan daerah tidak pernah sepenuhnya bebas nilai karena selalu berhubungan dengan relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan politik yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pembacaan politik representasi penting untuk melihat kelompok mana yang dibuat

terlihat, kelompok mana yang kurang muncul, dan bagaimana kategori penerima manfaat dinormalisasi melalui dokumen kebijakan (Chen, 2022; Marwah, 2019; Novianti et al., 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi masalah pendidikan dalam Program Beasiswa Cinta Bergema Kabupaten Jember menggunakan pendekatan *What's the Problem Represented to be?* (WPR) dari Carol Bacchi. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan daerah tidak hanya bekerja sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai arena politik, simbolik, dan diskursif dalam proses pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika kebijakan publik dalam konteks sosial-politik tertentu, khususnya terkait representasi masalah pendidikan dalam Program Beasiswa Cinta Bergema Kabupaten Jember. Sementara itu, desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu fenomena spesifik yang dianalisis secara kontekstual dan komprehensif dalam kehidupan sosial nyata.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus kajian pada implementasi Program Beasiswa Cinta Bergema yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendidikan. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa program tersebut merupakan salah satu kebijakan pendidikan daerah yang memiliki dimensi sosial, politik, dan simbolik yang kuat dalam praktik implementasinya.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai informan utama, dokumentasi kebijakan berupa petunjuk teknis dan regulasi program, serta observasi terhadap praktik implementasi kebijakan di lapangan. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperkuat validitas penelitian melalui triangulasi sumber dan metode.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Dalam proses interpretasi data, penelitian ini menggunakan pendekatan *What's the Problem Represented to be?* (WPR) dari Carol Bacchi dengan enam pertanyaan analitis sebagai instrumen utama untuk membedah representasi masalah dalam kebijakan beasiswa (Bacchi, 2009; Riemann, 2023). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pemerintah daerah mendefinisikan masalah pendidikan, asumsi yang melandasi kebijakan, hingga implikasi sosial-politik yang dihasilkan dari representasi kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Masalah Pendidikan dalam Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember merepresentasikan persoalan pendidikan terutama sebagai masalah keterbatasan ekonomi masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi. Representasi tersebut terlihat dari dominasi kuota afirmasi ekonomi sebesar 30 persen sebagai jalur penerima terbesar dalam Program Beasiswa Cinta Bergema. Pemerintah daerah memandang biaya pendidikan sebagai hambatan utama bagi masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga intervensi fiskal melalui program beasiswa dianggap sebagai solusi strategis untuk memperluas akses pendidikan. Temuan ini sejalan dengan kajian kebijakan beasiswa di Indonesia yang menunjukkan bahwa beasiswa sering ditempatkan sebagai instrumen akses pendidikan,

pembangunan modal manusia, dan distribusi kesempatan, meskipun implementasinya tetap dapat memunculkan persoalan pemerataan dan kategori prioritas (Apriliani & Jannah, 2025; Rachman, 2023; Rifa'i, 2019).

Dalam perspektif *What's the Problem Represented to be?* (WPR), representasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membingkai persoalan pendidikan terutama dalam dimensi ekonomi. Akibatnya, persoalan lain yang bersifat struktural seperti ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah, rendahnya relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pembangunan daerah, keterbatasan ekosistem riset dan inovasi lokal, hingga lemahnya konektivitas antara dunia pendidikan dan sektor unggulan daerah menjadi kurang terlihat dalam desain kebijakan. Karena itu, WPR membantu menyingkap bagaimana fokus pada hambatan biaya dapat membuat dimensi struktural lain menjadi kurang terlihat dalam desain kebijakan (Musubika & Lotherington, 2025; Woo, 2023).

Padahal, jika dikaitkan dengan arah pembangunan Kabupaten Jember, kebutuhan pembangunan sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan perluasan akses pendidikan tinggi, tetapi juga menyangkut penguatan kapasitas masyarakat yang mampu mendukung sektor strategis daerah. Dengan demikian, representasi masalah pendidikan yang terlalu berfokus pada aspek ekonomi berpotensi menyederhanakan kompleksitas persoalan pendidikan yang sesungguhnya lebih multidimensional.

Dimensi Politik Identitas dalam Kebijakan

Program Beasiswa Cinta Bergema juga menunjukkan adanya representasi identitas sosial-keagamaan tertentu melalui jalur santri pondok pesantren dan penghafal Al-Qur'an. Secara administratif pemerintah memang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa program tersebut eksklusif bagi kelompok agama tertentu. Namun secara substantif, kategori "santri" dan "penghafal Al-Qur'an" membentuk batas identitas yang sangat dekat dengan kultur Islam pesantren. Dalam kajian representasi kebijakan, kategori sosial semacam ini penting dibaca karena ia tidak hanya menyebut penerima manfaat, tetapi juga mengonstruksi batas simbolik mengenai kelompok yang dianggap layak diprioritaskan (Novianti et al., 2026; Yurista, 2023).

Dalam konteks Kabupaten Jember yang memiliki kultur pesantren cukup kuat, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk afirmasi simbolik terhadap identitas sosial tertentu yang memiliki kedekatan dengan basis politik kepala daerah. Politik identitas dalam kebijakan publik tidak selalu hadir dalam bentuk diskriminasi yang terbuka, tetapi dapat muncul melalui penetapan kategori penerima manfaat yang secara simbolik mengakomodasi kelompok sosial tertentu. Politik representasi semacam ini dapat dipahami sebagai hubungan antara narasi kebijakan, simbol sosial, dan kalkulasi legitimasi dalam ruang pemerintahan daerah (Lawlor, 2016; Rochmansjah & Saputra, 2024).

Melalui pendekatan Bacchi, kategori kebijakan seperti "santri" dan "penghafal Al-Qur'an" bukan sekadar istilah administratif, melainkan bentuk representasi masalah yang menentukan identitas mana yang dipandang membutuhkan perhatian khusus dari negara. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak sepenuhnya bergerak pada prinsip universalitas pelayanan publik, tetapi juga memuat dimensi simbolik dan politik identitas dalam distribusi sumber daya pendidikan. Dengan kata lain, kategori kebijakan bekerja sebagai perangkat diskursif yang menghasilkan subjek kebijakan dan menata relasi antara negara dengan kelompok sasaran (Bacchi, 2009; Bletsas & Beasley, 2012).

Kecenderungan Rezim Personalistik

Penelitian ini juga menemukan bahwa Program Beasiswa Cinta Bergema memiliki kecenderungan personalistik yang cukup kuat. Dalam wawancara penelitian, narasumber beberapa kali menyebut program tersebut sebagai "program gus bupati". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh preferensi personal kepala daerah dibandingkan proses kelembagaan

berbasis kajian akademik yang komprehensif.

Fenomena tersebut mencerminkan karakteristik rezim personalistik, yaitu ketika legitimasi kebijakan lebih bertumpu pada figur pemimpin dibandingkan kapasitas institusi pemerintahan. Dalam kondisi demikian, birokrasi cenderung berfungsi sebagai pelaksana kehendak politik kepala daerah, bukan sebagai aktor profesional yang memiliki otonomi teknokratis dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dapat bergerak dari logika kelembagaan menuju logika personalisasi kekuasaan ketika narasi program lebih kuat dilekatkan pada figur pemimpin dari pada desain institusional yang berkelanjutan (Rochmansjah & Saputra, 2024; Wilda et al., 2024).

Akibatnya, kebijakan pendidikan berpotensi lebih diarahkan sebagai instrumen penguatan citra politik dibandingkan instrumen pembangunan pendidikan jangka panjang yang terintegrasi dengan kebutuhan strategis daerah. Ketergantungan kebijakan pada figur kepala daerah juga berisiko menciptakan ketidakberlanjutan program apabila terjadi pergantian kepemimpinan politik di masa mendatang.

Efek Representasi Kebijakan

Dalam perspektif Bacchi, representasi masalah dalam kebijakan menghasilkan tiga bentuk efek utama, yaitu efek diskursif, efek pada subjek, dan efek pada praktik sosial (Bacchi, 2009; Riemann, 2023). Program Beasiswa Cinta Bergema menghasilkan efek diskursif dengan membentuk pemahaman publik bahwa persoalan utama pendidikan terletak pada keterbatasan biaya pendidikan. Narasi tersebut kemudian menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan intervensi kebijakan berbasis bantuan pendidikan. Selain itu, kebijakan juga menghasilkan efek pada subjek melalui pembentukan kategori sosial tertentu seperti “mahasiswa layak dibantu”, “santri prioritas”, dan “kelompok afirmasi”. Kategori-kategori tersebut tidak bersifat netral karena menentukan kelompok mana yang memperoleh perhatian dan prioritas distribusi sumber daya negara.

Di sisi lain, kebijakan juga menghasilkan efek pada praktik sosial melalui penguatan simbol identitas tertentu dalam penggunaan anggaran publik. Dengan demikian, program beasiswa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan pendidikan, tetapi juga sebagai mekanisme produksi legitimasi sosial-politik pemerintah daerah melalui distribusi simbolik dan material kepada kelompok masyarakat tertentu. Efek kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa representasi masalah tidak berhenti pada dokumen, tetapi memengaruhi praktik distribusi, pembentukan identitas penerima, dan cara publik memahami prioritas pemerintah (Hickman & Muir, 2026; Woo, 2023).

KESIMPULAN

Program Beasiswa Cinta Bergema merepresentasikan persoalan pendidikan terutama sebagai masalah keterbatasan ekonomi masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi. Namun representasi tersebut tidak sepenuhnya netral karena juga memuat dimensi simbolik dan identitas sosial-keagamaan tertentu melalui jalur afirmasi santri pondok pesantren dan penghafal Al-Qur'an. Kebijakan ini menunjukkan kecenderungan personalistik karena sangat dipengaruhi oleh preferensi dan citra politik kepala daerah dalam proses formulasi maupun implementasinya.

Melalui pendekatan *What's the Problem Represented to be?* (WPR) dari Carol Bacchi, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berfungsi menyelesaikan masalah sosial, tetapi juga membentuk definisi masalah, memproduksi kategori sosial, dan menentukan kelompok yang dianggap prioritas oleh negara. Dalam konteks tersebut, Program Beasiswa Cinta Bergema tidak hanya menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan, tetapi juga menjadi arena produksi legitimasi sosial-politik pemerintah daerah. Dengan demikian, WPR memberi kontribusi metodologis bagi kajian

kebijakan publik kritis karena mampu memperlihatkan relasi antara representasi masalah, produksi subjek, dan efek kekuasaan dalam kebijakan (Bacchi, 2009; Molla, 2021; Riemann, 2023).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan beasiswa daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial pendidikan yang bersifat populis jangka pendek, tetapi juga diarahkan sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia yang strategis, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan pendidikan yang lebih berbasis kebutuhan struktural daerah, memperhatikan prinsip universalitas pelayanan publik, serta tidak terlalu bergantung pada simbolisasi politik identitas dalam distribusi sumber daya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, I., & Jannah, L. M. (2025). Implementation of affirmative scholarship policy by Indonesia Endowment Fund for Education. *Global International Journal of Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2). <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.377>
- Bacchi, C. (2009). *Analysing policy: What's the problem represented to be?* Pearson Education.
- Bletsas, A., & Beasley, C. (Eds.). (2012). *Engaging with Carol Bacchi: Strategic interventions and exchanges*. University of Adelaide Press.
- Chen, J. (2022). Representing Chinese Indonesians: Pribumi discourse and regional elections in post-reform Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.
- Hickman, M. E., & Muir, R. (2026). Integrating co-analysis and researcher reflexivity into Bacchi's 'what is the problem represented to be?' framework: A cervical screening case study. *Critical Policy Studies*.
- Kosasih, A., Juniarta, N. E., Fadli, Y., Nurlukman, A. D., & Basit, A. (2023). The excellence scholarships program: Analysis of implementation aspects and societal impact. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i1.9152>
- Lawlor, A. (2018). "Seventeen: Media and public policy". In *Policy Analysis in Canada*. Bristol, UK: Policy Press. Retrieved Jun 19, 2026, from <https://doi.org/10.51952/9781447334927.ch017>
- Marwah, S. (2019). Women of the south coast of Java in politics and rural development. *Journal of International Women's Studies*, 20(7), 57-71.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.
- Molla, T. (2021). Critical policy scholarship in education: An overview. *Education Policy Analysis Archives*, 29, 2-2.
- Musubika, S., & Lotherington, A. T. (2025). Dissecting discourses in policy: Diversity, equity, and inclusion (DEI) problematizations in academia. *Social Inclusion*, 13.
- Novianti, S., Ayuningtyas, W. E. P., Wicaksana, H. D., Pertiwi, G., & Hesti, C. K. (2026). REPRESENTATION, GENDER, AND PUBLIC POLICY: CONTEMPORARY PRACTICES IN INDONESIA. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 13(3), 93-105.
- Rachman, M. A. (2023). Scholarship for catching up? The Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP) scholarship program as a pillar of economic development policy. *International Journal of Educational Development*, 96, 102701.
- Riemann, M. (2023). Studying problematizations: The value of Carol Bacchi's 'What's the problem represented to be?' (WPR) methodology for IR. *Alternatives*, 48(2), 151-169.
- Rifa'i, A. A. (2019). Education policy for equalization: An analysis of higher education opportunities in Indonesia. *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 66-84.
- Rochmansjah, H., & Saputra, R. (2024). Decoding public policy. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(4), 77-96.
- Sparrow, R. (2007). Protecting education for the poor in times of crisis: An evaluation of a scholarship programme in Indonesia. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(1), 99-122.
- Wilda, S., Siskasari, W., & Hasibuan, Z. E. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Ahsani Taqawim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan*, 1(3), 162-176.

- Woo, E. (2023). What is the problem represented to be in China's world-class university policy? A poststructural analysis. *Journal of Education Policy*, 38(4), 644-664.
- Yurista, H. P. (2023). Beyond Quota, Towards Women's Representation In Indonesia: Quo Vadis? *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2).